

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

-----, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.

Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.

Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Bagian 1*, Alumni, Bandung.

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama. Bandung.

Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang Dan Diklat, Jakarta.

Laden Marpaung, 2005, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, CV. Mandar Maju, Bandung.

-----, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

-----, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, PT. Alumni, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Bandung.

Wildan Suyuti Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

B. JURNAL

Ahmad Gelora Mahardika, "Kedudukan Hukum PPKM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Vol. 1(1), Maret 2021, hlm. 2.

Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 5, Nomor 2 Februari 2016, hlm. 82-83.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali.

D. INTERNET/WEBSITE

<http://www.berandahukum.com/a/pembagian-hukum-pidana> Diakses pada 3 Oktober 2021.

<https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/943/pdf> Diakses pada 9 Oktober 2021.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level> Diakses pada 9 Oktober 2021.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19> Diakses pada 9 Oktober 2021.

<https://nasional.kontan.co.id/news/kembali-direvisi-berikut-ketentuan-terbaru-aturan-ppkm-darurat> Diakses pada 9 Oktober 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-5640047/makna-ppkm-kepanjangan-hingga-aturannya> Diakses pada 10 Oktober 2021.

<https://repository.ut.ac.id/4058/1/HKUM4203-M1.pdf> Diakses pada 3 Oktober 2021.

<https://setkab.go.id/ketentuan-pembatasan-kegiatan-dan-cakupan-ppkm-darurat/> Diakses pada 12 Januari 2022.

<https://thecolumnist.id/artikel/pilihan-strategi-dki-jakarta-tangani-covid19-573>, Diakses pada 3 Januari 2022.

<https://tirto.id/pemerintah-perpanjang-status-darurat-bencana-covid-19-hingga-29-mei-eFJU>, Diakses pada 3 Januari 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan> diakses pada 5 Oktober 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5971008e81638/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran/> diakses pada 3 Oktober 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/31/150000165/ini-perbedaan-aturan-ppkm-level-1-2-3-dan-4> Diakses pada 19 Januari 2022.

<https://www.nu.or.id/post/read/117376/kasus-pertama--dua-orang-di-indonesia-positif-terinfeksi-virus-corona> Diakses pada 9 Oktober 2021.

<https://www.okezone.com/covid-19> Diakses pada 9 Oktober 2021.

E. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN.Mad.

F. SKRIPSI

M. Aris Munandar. 2021. *“Ketentuan Pidana Penyelenggaraan Kekeharantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekeharantinaan Kesehatan”*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Aqnes Putra Andriza, 2021, *“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang”*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang.

Anis Khairiyah, 2021, "Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Kesejahteraan Sosial (*Welfare Society*)". Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

G. LAIN-LAIN

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020, Panduan Praktik Klinis: *Pneumonia 2019-nCoV*. PDPI: Jakarta, hlm.11.